

# KETEGANGAN HUBUNGAN INDIA-PAKISTAN

Parlaungan SIBARANI\*

## PENDAHULUAN

Sikap India dan Pakistan mengenai persahabatan dan perdamaian tidak konsisten. Di satu pihak mereka berhasrat untuk menjalin hubungan yang lebih erat, namun di lain pihak mereka tidak dapat menghilangkan sikap saling mencurigai. Sebelum hasrat ke arah perbaikan hubungan itu terwujud, keduanya terlibat lagi dalam suasana hubungan yang tegang (memburuk). Hal itu terjadi karena India menentang dan mencurigai rencana Pakistan untuk memodernisasi angkatan bersenjataanya dengan senjata-senjata mutakhir yang disuplai Amerika Serikat berdasarkan suatu paket bantuan ekonomi dan militer sebesar US\$ 3,2 milyar beserta pengiriman pesawat mutakhir F-16.

India menganggap bahwa bantuan itu merupakan ancaman terhadap dirinya dan menggoncangkan perimbangan keamanan di kawasan Asia Selatan serta menimbulkan perlombaan senjata di anak benua itu, padahal Pakistan membutuhkannya untuk menghadapi ancaman Afghanistan sebagai akibat invasi tentara Uni Soviet ke negara itu. Akibat pertentangan sikap dalam masalah ini hubungan mereka menjadi tegang (memburuk).

Tulisan ini akan membahas ketegangan hubungan itu untuk mengetahui secara lebih jelas duduk permasalahannya serta kemungkinan-kemungkinan akibatnya.

## HASRAT MEMPERBAIKI HUBUNGAN DAN MANFAATNYA

Adanya hasrat untuk memperbaiki hubungan mereka yang memang kurang serasi serta diliputi oleh perasaan saling mencurigai selama beberapa de-

---

\*Staf CSIS.

kade ini<sup>1</sup> dapat dilihat dari kunjungan timbal balik Menteri Luar Negeri kedua negara. Pertama-tama kunjungan Menteri Luar Negeri Pakistan Agha Shahi ke India pada bulan Juli tahun 1980.<sup>2</sup> Agha Shahi mengatakan bahwa kunjungan itu bertujuan untuk melanjutkan dialog antara Pakistan dan India mengenai masalah kepentingan mereka. Tetapi kecuali membicarakan masalah-masalah bilateral, ia bersama rekannya Menteri Luar Negeri India, P.V. Narasimha Rao telah membahas pula masalah-masalah regional dan internasional.

Di India, Agha Shahi mengatakan bahwa pendekatan yang kontinyu dan didasarkan pada prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai sangat memungkinkan kedua negara mengembangkan sikap saling mempercayai serta pemahaman terhadap pokok-pokok pandangan mengenai masalah-masalah kepentingan bersama. Pernyataan ini merupakan penegasan lebih lanjut terhadap pernyataan Presiden Pakistan Zia ul-Haq bulan Januari 1980 dalam wawancaranya dengan harian *Die Welt* mengenai keinginan Pakistan untuk hidup berdampingan secara damai dengan India. Pernyataan Zia ini dikeluarkan untuk menetralisasi kecurigaan India terhadap niat dan rencana Pakistan untuk memodernisasi persenjataannya.

Persetujuan Simla tahun 1972<sup>3</sup> yang ditandatangani oleh kedua negara setelah mereka terlibat dalam peperangan mengenai persoalan Bangladesh pada tahun 1971 sebenarnya telah mengungkapkan keinginan untuk menormalisasi hubungan bilateral mereka. Namun persetujuan itu pada kenyataannya lebih sering dilanggar daripada dipatuhi. Hubungan mereka kemudian mengalami kemunduran hebat setelah India dan Uni Soviet menandatangani perjanjian jual beli senjata bernilai US\$ 1,63 milyar pada bulan Mei tahun 1980.<sup>4</sup>

Kunjungan Menteri Luar Negeri Pakistan ke India itu, sekalipun tidak menghasilkan hal-hal yang konkrit bagi perbaikan hubungan mereka, dilukiskan oleh Menteri Luar Negeri Agha Shahi sebagai "tepat pada waktunya dan konstruktif."

Suatu jalinan hubungan yang erat dan akrab antara kedua negara yang terletak di anak benua Asia itu, bila terwujud merupakan peristiwa bersejarah yang harus disambut dengan baik. Sebab adalah sangat vital dan esensial untuk mewujudkan kestabilan politik serta situasi yang damai, aman dan tentram di kawasan itu.

<sup>1</sup>Pemusuhan mereka berkembang sejak tahun 1947 ketika Pakistan memisahkan diri dari India menjadi sebuah negara yang otonom dan berdaulat.

<sup>2</sup>Pada bulan Januari 1980, Menteri Luar Negeri India terdahulu R.D. Sathé juga telah berkunjung ke Pakistan untuk mengadakan konsultasi-konsultasi. Usaha-usaha untuk memperbaiki hubungan mereka sebenarnya sudah berulang kali dilakukan, namun terus mengalami jalan buntu.

<sup>3</sup>Persetujuan itu menetapkan pola untuk memecahkan perbedaan-perbedaan antara India dan Pakistan secara damai. Lihat *Indonesia dan Dunia Internasional*, CSIS, halaman 129, tahun 1973.

<sup>4</sup>*Antara*, 9 Agustus 1981.

Kawasan Asia Selatan dilihat dari aspek geo-politik sangat strategis dan terus-menerus menjadi incaran kepentingan ideologi, politik dan strategi militer Uni Soviet, Amerika Serikat dan RRC. Oleh karena itu suatu perselisihan dan pertikaian yang terjadi antara negara-negara di kawasan itu akan segera dimanfaatkan negara-negara itu untuk menanamkan pengaruh politik dan militernya (juga ekonomi).

Sudah merupakan kenyataan bahwa secara politis India berada di bawah pengaruh Uni Soviet<sup>1</sup> dan Pakistan sangat condong untuk menjalin hubungan yang erat dengan RRC dan Amerika Serikat. Kesemuanya ini merupakan akibat dari permusuhan dan pertikaian yang berlangsung terus-menerus antara India dan Pakistan sejak kedua negara ini lahir dari satu "negara induk" secara terpisah. Permusuhan dan pertikaian itu menjadi lebih luas serta lebih mendalam ketika pecah perang antara India dan Pakistan pada tahun 1971 yang memungkinkan Bangladesh (dulu Pakistan Timur) memisahkan diri dari Pakistan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Suatu jalinan hubungan yang bersahabat antara India dan Pakistan di samping sangat bermanfaat bagi mereka, mempunyai arti politis yang sangat luas bagi kawasan Asia Selatan pada khususnya dan negara-negara berkembang pada umumnya. Kestabilan politik di kawasan itu akan lebih terjamin serta memungkinkan negara-negara di kawasan Asia Selatan menjalin hubungan dan kerja sama yang bermanfaat. Terciptanya suatu kondisi yang baik di kawasan Asia Selatan akan memudahkan usaha-usaha untuk mencegah atau mengatasi perbedaan serta percekocokan antara mereka, terlebih-lebih bila pembentukan kerja sama regional negara-negara Asia Selatan<sup>2</sup> yang kini sedang diijak dapat diwujudkan.

Ditilik dari sudut kepentingan negara-negara sedang berkembang, situasi politik yang stabil di kawasan Asia Selatan akan lebih memperkokoh solidaritas dan kerja sama mereka untuk menghadapi negara-negara industri maju di forum-forum internasional, terutama dalam kaitannya dengan dialog Utara-Selatan, dan untuk menghadapi move-move dan manuver-manuver politik serta militer negara-negara super power yang telah mengakibatkan ketidakpastian situasi dunia. Kestabilan politik di kawasan Asia Selatan juga akan lebih memperkokoh barisan gerakan Non-Blok. Itulah antara lain manfaat-manfaat yang dapat dipetik bilamana terwujud hubungan yang erat dan akrab

<sup>1</sup>Dengan Uni Soviet, India menandatangani Persetujuan Persahabatan (9 Agustus 1981) yang menetapkan antara lain konsultasi timbal balik untuk melenyapkan ancaman jika salah satu pihak diserang atau diancam serangan. Semenjak itu banyak negara yang meragukan kemurnian status India sebagai anggota Non-Blok karena dianggap condong pro Moskow.

<sup>2</sup>Kerja sama negara-negara Asia Selatan itu meliputi tujuh negara yaitu Bangladesh, India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bhutan dan Kepulauan Maldiva. Kerja sama itu akan berbentuk suatu Badan Kerja Sama Regional seperti yang diusulkan pertama kali oleh Bangladesh. Namun prospek bagi pembentukan badan kerja sama regional itu masih dalam proses penggodokan.

di kalangan negara-negara Asia Selatan. Namun hal itu masih merupakan "impian" belaka (wishfullthinking).

Sikap saling mencurigai di antara mereka terus berkembang terutama dari pihak India. Pada bulan Agustus 1980, Perdana Menteri India Ny. Indira Gandhi kembali melemparkan sinyalemennya mengenai adanya kegiatan Pakistan untuk membuat bom atom dengan negara-negara lain.<sup>1</sup> Dan di bulan Nopember 1980, ia mengeluarkan sebuah pernyataan mengenai kemungkinan berkobarnya peperangan antara India dan Pakistan karena India mencurigai rencana Pakistan untuk memodernisasi angkatan bersenjataanya.

Kedua pernyataan Ny. Indira Gandhi itu telah dibantah oleh Menteri Luar Negeri Pakistan Agha Shahi dengan memberi jaminan-jaminan kepada India bahwa Pakistan tidak membuat bom atom dan bahwa program pengembangan nuklirnya dimaksudkan untuk tujuan-tujuan damai.<sup>2</sup>

Untuk menyingkirkan "ancaman peperangan" seperti dinyatakan Ny. Indira Gandhi, Agha Shahi mengatakan bahwa Pakistan bersedia merundingkan hal itu dengan India serta ingin menjalin hubungan yang lebih baik. Akan tetapi dari pernyataan-pernyataan mereka dapat disimpulkan bahwa kesemuanya itu mencerminkan semakin menajamnya perbedaan politik mereka, terlebih-lebih setelah berlangsung perundingan-perundingan yang intensif antara Pakistan dan Amerika Serikat untuk mematangkan realisasi paket bantuan ekonomi dan militer sebesar US\$ 3,20 milyar beserta pengiriman pesawat-pesawat F-16 kepada Pakistan.

Pada bulan Juni tahun 1981, Menteri Luar Negeri India P.V. Narasimha Rao mengadakan kunjungan balasan ke Pakistan. Di samping untuk menajam kemungkinan menjalin hubungan yang lebih baik dengan Pakistan,<sup>3</sup> kunjungan itu juga dimaksudkan untuk mencari kejelasan mengenai bantuan persenjataan mutakhir yang akan diterima Pakistan dari Amerika Serikat. Dari reaksi-reaksi yang dikeluarkan oleh India adalah jelas bahwa masalah ini sangat menggelisahkan India sehingga ia memerlukan kejelasan (clearance) dari Pakistan mengenai maksud dan tujuan paket bantuan itu, terutama mengenai pengiriman pesawat mutakhir F-16.

<sup>1</sup>Pers Barat pernah memberitakan Pakistan akan membuat "Bom Islam" dengan bantuan Libia sebesar US\$ 5 juta. Tetapi berita itu dibantah oleh Pakistan. *Kompas*, 2 September 1980.

<sup>2</sup>Dalam membela program nuklirnya Presiden Zia ul-Haq menunjuk impor minyak Pakistan sebesar US\$ 1,2 milyar. Dalam konteks inilah Pakistan terdorong untuk mengembangkan teknologi nuklirnya yang dapat dimanfaatkan untuk meneruskan proyek-proyek pembangunan nasional yang sangat utama dan penting. *Antara*, 11 Maret 1980. Ketua Komisi Tenaga Atom Pakistan, Munir Ahmed Khan selanjutnya menyatakan penggunaan tenaga nuklir itu bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Pakistan terhadap minyak impor yang harganya selalu meningkat. *Kompas*, *loc. cit.*

<sup>3</sup>Lihat P.V. Narasimha Rao, "India and Pakistan: A Framework for Friendship," *Pakistan Horizon*, Volume XXIV, No. 2.

Di Pakistan, Menteri Luar Negeri India Narasimha Rao memang mengatakan bahwa Pakistan dan India akan mengubur masa lalunya dan akan melihat ke masa depan yang lebih baik. Ucapan ini dapat ditafsirkan sebagai isyarat India kepada Pakistan mengenai hasratnya untuk membuka suatu hubungan babak baru yang lebih positif. Landasannya adalah Persetujuan Simla bulan Mei 1972 yang ditandatangani sesudah "perang kemerdekaan" Bangladesh pada tahun 1971.

Namun seperti diduga sebelumnya, kunjungan itu tidak menghasilkan hal-hal baru yang memungkinkan mereka menjalin hubungan yang betul-betul bebas dari prasangka-prasangka. Kiranya kedua negara masih menghadapi hambatan-hambatan psikologis, baik karena alasan-alasan historis yang sukar dihapuskan (latent), maupun karena perkembangan-perkembangan situasi regional dan internasional yang menempatkan kedua negara itu dalam posisi yang berbeda sebagai akibat perbedaan persepsi antara mereka.

Lebih dari itu, meskipun Pakistan telah menjelaskan kepada India alasan serta maksud dan tujuan paket bantuan militer dan ekonomi dari Amerika Serikat itu, India tetap curiga dan menganggap paket bantuan itu sebagai ancaman terhadap dirinya.

## INVASI UNI SOVIET KE AFGHANISTAN

Kemelut Afghanistan akibat invasi tentara Uni Soviet ke Afghanistan pada bulan Desember 1979 sangat memprihatinkan Pakistan. Dipandang dari aspek geo-politik, Pakistan sebagai tetangga Afghanistan, kiranya beralasan bila Pakistan merasa sangat terancam.

Uni Soviet menempatkan sekitar 85.000-100.000 orang pasukannya di Afghanistan dan mengubah bentuk dan sistem negara itu dari bentuk dan sistem monarki-Islam menjadi negara komunis di bawah pemerintahan rezim boneka Babrak Karmal. Pakistan benar-benar menyadari bahwa tampilnya suatu rezim baru berhaluan komunis yang didukung oleh kekuatan militer Uni Soviet di Afghanistan otomatis mengharuskan Pakistan menghadapi dua front sekaligus, yaitu Afghanistan/Uni Soviet di sebelah Barat dan India di sebelah Timur.

Secara historis hubungan antara Pakistan dan Afghanistan tidak begitu harmonis. Antara mereka sering terjadi perselisihan dan konflik bersenjata akibat persengketaan wilayah dan konflik kepentingan nasional. Persengketaan-persengketaan itu berkaitan dengan masalah hak menentukan nasib sendiri

atau otonomi Baluchistan. Perjuangan negara Baluchistan yang didukung Afghanistan ini merupakan sumber pertentangan nasional yang eksplosif antara Pakistan dan Afghanistan (juga Iran). Selain itu terdapat persengketaan bilateral antara Afghanistan dan Pakistan sehubungan dengan perbatasan "Durand Line" dan masalah integrasi wilayah Pustunistan.<sup>1</sup> Oleh karena itu, terbentuknya rezim boneka Babrak Karmal yang berideologi komunis serta dipayungi oleh kekuatan militer Uni Soviet dirasakan oleh Pakistan sebagai ancaman yang sangat serius terhadap eksistensinya.<sup>2</sup>

Kekuatiran Pakistan itu diungkapkan melalui kecaman-kecaman yang dilancarkan kepada Uni Soviet dan tuntutan kepadanya agar menarik ke luar seluruh pasukannya dari Afghanistan. Terhadap invasi itu Pakistan menunjukkan garis politik yang tegas dan keras. Hingga kini Pakistan tidak bersedia mengakui rezim boneka Babrak Karmal ciptaan Uni Soviet meskipun terus mendapat tekanan-tekanan dari Uni Soviet.<sup>3</sup>

Di bidang militer, kekuatiran itu mendorong Pakistan untuk memindahkan sepertiga dari 450.000 orang pasukannya yang ditempatkan selama ini di bagian Timur Pakistan sepanjang perbatasan dengan India ke perbatasannya dengan Afghanistan. Sebagai tindak lanjut kekuatiran Pakistan dengan invasi tentara Uni Soviet ke Afghanistan dengan segala bentuk ancaman terhadap dirinya itu, Pakistan berusaha memperkuat pertahanannya dengan jalan meningkatkan kualitas dan kuantitas peralatan militernya (modernisasi). Jalan pintas yang ditempuh Pakistan ke arah ini antara lain ialah meningkatkan anggaran pertahanannya sebanyak 12% menjadi US\$ 1,53 milyar dari anggaran negara tahun 1980/1981 sebesar US\$ 5,78 milyar. Namun Pakistan sangat menyadari bahwa dengan mengandalkan kekuatannya sendiri ia mustahil mampu mempertahankan diri terhadap ancaman Afghanistan/Uni Soviet. Dalam pandangannya, invasi Uni Soviet ke Afghanistan merupakan bagian dari usahanya untuk menguasai dunia, khususnya Asia Selatan.

Sesuai dengan pandangan ini, invasi Uni Soviet ke Afghanistan dilihatnya sebagai langkah untuk menguasai Asia Selatan dan memasukkannya ke dalam orbit pengaruhnya, baik politis maupun militer.<sup>4</sup> Pakistan menduga bahwa sa-

<sup>1</sup>Lihat Michael B. Soebagyo, "Afghanistan: Interdependensi Ekonomi Menuju Integrasi," *Suara Karya*, 10 Nopember 1981.

<sup>2</sup>Banyak pejabat Pakistan mencemaskan bahwa propinsi Baluchistan yang terbelakang dan separatis akan menjadi sasaran Uni Soviet berikutnya setelah Afghanistan. *Suara Karya*, 9 Maret 1980.

<sup>3</sup>Tekanan itu antara lain dapat dilihat dari kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Uni Soviet Nikolai Firyubin ke Pakistan pada bulan Agustus 1981. Di Pakistan, Firyubin mencoba melunakkan sikap Pakistan terhadap masalah Afghanistan, tetapi Pakistan tetap konsisten dengan sikapnya.

<sup>4</sup>Beberapa pengamat mengatakan bahwa invasi militer Uni Soviet di Afghanistan merupakan suatu penggelaran kekuatan ke arah Selatan. Michael B. Soebagyo, *loc. cit.*

saran berikutnya adalah dirinya. Kemungkinan invasi Uni Soviet ke Pakistan ini telah diungkapkan antara lain oleh *Renmin Ribao* (*Harian Rakyat*, suara resmi Partai Komunis Cina), yang mengatakan bahwa Pakistan telah dipilih oleh Uni Soviet sebagai sasaran berikutnya.<sup>1</sup> Perkiraan terhadap ancaman inilah yang mendorong Pakistan untuk berpaling kepada Amerika Serikat. Pakistan melihat bahwa alternatif yang memungkinkan dirinya "menangkal" ancaman Uni Soviet ialah bantuan militer dari Amerika Serikat berupa persenjataan dan perlengkapan militer yang mutakhir.

Pakistan bukanlah "kenalan baru" bagi Amerika Serikat, tetapi bahkan pernah merupakan sekutu militernya dalam pakta militer CENTO dan SEATO. Baru setelah Pakistan menarik diri dari SEATO, hubungan mereka tidak semesra masa-masa sebelumnya.<sup>2</sup> Walaupun demikian secara politis, Amerika Serikat tetap cenderung untuk menganggap Pakistan sebagai salah satu sekutu strategisnya di Asia Selatan yang perlu dibela terhadap setiap ancaman meskipun dalam tingkat yang terbatas, seperti terungkap dalam sikap yang diambilnya ketika pecah perang antara India dan Pakistan pada tahun 1971. Meskipun tidak berbuat "banyak," sekurang-kurangnya Amerika Serikat memperlihatkan sikap yang lebih memihak kepada Pakistan. Dan diduga, dari reaksi-reaksi yang diperlihatkan pada waktu itu, bahwa Amerika Serikat akan melibatkan diri lebih jauh bilamana perang itu meluas untuk membantu Pakistan menghadapi India yang ditunjang (di back-up) oleh persenjataan Uni Soviet.<sup>3</sup>

Mengenai krisis Afghanistan itu, kiranya terdapat persamaan persepsi antara Amerika Serikat dan Pakistan. Amerika Serikat mengemukakan keras dan mengutuk intervensi Uni Soviet di Afghanistan.<sup>4</sup> Dalam dimensi yang luas, Amerika Serikat juga melihat invasi itu sebagai bagian dari strategi global Uni Soviet untuk menguasai dunia. Amerika Serikat menduga bahwa dengan menguasai Afghanistan, Uni Soviet akan menjatuhkan "kartu-kartu" lainnya dan bahwa Pakistan dan Iran yang sedang menghadapi kerapuhan akibat pergolakan dalam negerinya akan menjadi sasaran berikutnya. Dengan menguasai negara-negara ini Uni Soviet akan semakin dekat dengan cita-citanya un-

---

<sup>1</sup>Lihat Wiratmo Soekito, "Kemungkinan Invasi Uni Soviet ke Pakistan," *Pelita*, 8 Januari 1981.

<sup>2</sup>Sebab-sebab lain yang menyebabkan hubungan mereka kurang harmonis adalah keinginan Pakistan untuk menjauh dari naungan payung Amerika Serikat dan kembali ke citra Non-Blok, serta kurang asasinya Pemerintah Zia ul-Haq di mata Presiden Jimmy Carter yang mendasarkan politik luar negerinya pada hak asasi manusia.

<sup>3</sup>Lihat Arthur W. Hummel Jr., "U.S - Pakistan Relations," *Pakistan Horizon*, Vol. XXXIV, No. 2, halaman 31.

<sup>4</sup>Kecaman itu antara lain dilakukan dengan memboikot Olimpiade 1980 yang berlangsung di Moskow dan mengenakan embargo gandum kepada Uni Soviet.

tuk mendominasi Teluk Parsi (Persian Gulf) yang kaya akan minyak mentah. Dan dengan demikian Uni Soviet akan melemahkan kekuatan Barat yang menggantungkan dirinya sebanyak 40% (di luar NATO) pada minyak Timur Tengah.

Apa yang dikuatirkan Amerika Serikat di sini cukup beralasan, sebab sukar untuk membayangkan akibat-akibat yang akan dihadapi oleh negara-negara Barat bilamana Uni Soviet berhasil menciptakan suatu garis pengaruh yang memanjang dari Indocina, Afghanistan, Asia Selatan dan Teluk Persia.<sup>1</sup>

Hal ini akan berarti "pukulan mematikan" terhadap Dunia Barat sebab dengan menguasai kawasan-kawasan itu, Dunia Barat akan kehilangan sebagian besar kemampuan strategisnya baik dari segi politis dan militer maupun ekonomi.

Dengan demikian ada kecocokan antara pilihan yang dibuat oleh Pakistan untuk memalingkan dirinya kepada Amerika Serikat dan persepsi Amerika Serikat mengenai invasi Uni Soviet ke Afghanistan. Pilihan itu rupanya mendapat sambutan yang positif dari Amerika Serikat, terutama setelah Ronald Reagan menjadi Presiden. Hal ini perlu dikemukakan di sini karena Presiden Jimmy Carter, meskipun menyadari ancaman serius yang dihadapi Pakistan pada khususnya dan Dunia Barat pada umumnya, sangat lemah dan ragu-ragu untuk bertindak tegas menghadapi manuver-manuver politik yang dilakukan oleh Uni Soviet yang sudah melanglang buana di hampir seluruh bagian dunia.<sup>2</sup> Agaknya dapat dikatakan bahwa "kelemahan" Carter inilah salah satu penyebab utama kekalahannya dalam pemilihan Presiden tahun 1980.

Presiden Ronald Reagan sebaliknya bersikap sangat keras dan tegas terhadap petualangan-petualangan politik dan militer Uni Soviet. Semua ini dilakukannya untuk memulihkan citra Amerika Serikat sebagai negara yang terkuat di segala bidang dan sekaligus membendung ambisi-ambisi hegemoni Uni Soviet. Dapat dikatakan bahwa Presiden Reagan dalam hal ini sangat berhasil memanfaatkan kondisi psikologis rakyat Amerika Serikat yang telah "muak" dipecundangi terus-menerus oleh Uni Soviet untuk mengangkat kembali harkat bangsa Amerika Serikat sebagai bangsa kelas satu.

<sup>1</sup>Bandingkanlah hal ini dengan dugaan Presiden Anwar Sadat mengenai rencana-rencana Uni Soviet untuk membentuk suatu busur wilayah dari jantung Afrika hingga jantung Asia sehingga mendorongnya untuk merancang suatu keseimbangan baru untuk mencegah memburuknya situasi di Timur Tengah. Lihat *Sinar Harapan*, 14 Oktober 1981.

<sup>2</sup>Antara lain dapat disebutkan Angola, Ethiopia, Yaman Selatan dan Vietnam. Dr. H. Kissinger melukiskannya sebagai "kemunduran geo-politik Amerika Serikat." Lihat B. Wiroguno, "Kemunduran Geopolitik Amerika Serikat di Timur Tengah," *Analisa*, Tahun VIII, No. 1, Januari 1979.

Dari pernyataan-pernyataan dan keputusan-keputusan Reagan, agaknya tidak salah untuk menyimpulkan bahwa kebijaksanaan luar negeri Amerika Serikat cenderung menggunakan pendekatan anti Uni Soviet (bahkan berlebihan), seolah-olah "di balik setiap semak" mengancam bahaya Uni Soviet. Kebijakan "tegas" terhadap Uni Soviet itu dianggap mutlak perlu untuk memobilisasi dukungan rakyat Amerika Serikat bagi usaha untuk meningkatkan anggaran pertahanannya, untuk mengimbangi peningkatan kekuatan militer Uni Soviet di mana-mana, di samping untuk memberikan kepastian dan menanamkan kepercayaan kembali di kalangan sekutu dan teman-teman Amerika Serikat.<sup>1</sup>

Tekad Presiden Reagan itu antara lain dituangkan dalam "Doktrin Reagan" yang akan melancarkan suatu ofensif di Asia guna mengakhiri keragu-raguan yang telah berlangsung selama satu dasawarsa. Namun yang menjadi motivasi utama bagi terciptanya Doktrin Reagan itu ialah kepentingan Amerika Serikat di Asia yang berada dalam bahaya, akibat semakin agresifnya Uni Soviet seperti terungkap dalam invasinya ke Afghanistan. *US News and World Report* yang melaporkannya secara lengkap mengatakan bahwa doktrin itu bertujuan untuk membendung ekspansionisme Uni Soviet di kawasan Asia dan untuk memulihkan kepemimpinan Amerika Serikat.

Doktrin Reagan itu meliputi tiga unsur. Pertama, koalisi anti Uni Soviet. Pemerintah Reagan menginginkan terbentuknya suatu pengelompokan bebas yang terdiri dari negara-negara sahabat untuk menghadapi ancaman dari Uni Soviet. Di samping Amerika Serikat, kelompok tersebut terdiri dari Jepang, RRC, Korea Selatan (juga ASEAN). Kedua, komitmen baru Amerika Serikat. Pemerintah Reagan berjanji akan mendukung negara-negara yang terancam di Asia Tenggara dan membantu korban agresi Uni Soviet dan sekutunya. Ketiga, meningkatkan kekuatan Amerika Serikat. Pertahanan Amerika Serikat di Timur Jauh akan diperkuat dengan rencana untuk mempertahankan sebuah armada besar secara permanen di Lautan Hindia tanpa memperlemah armadanya di Pasifik.<sup>2</sup>

Kesungguhan Reagan untuk melaksanakan tekadnya membendung perluasan daerah pengaruh (sphere of influence) dan daerah kepentingan (sphere of interest) Uni Soviet terlihat lagi dengan jelas dalam kebijaksanaan baru pemerintahnya yang membuka pintu selebar-lebarnya bagi setiap negara yang dianggapnya sebagai sekutu untuk membeli persenjataan konvensional Amerika Serikat.<sup>3</sup> Salah satu negara yang beruntung memetik manfaat dari kebijaksanaan baru itu adalah Pakistan.

<sup>1</sup>Lihat Jusuf Wanandi, "Reagan dan Dunia: Sebuah Pertanyaan," *Tempo*, 15 Agustus 1981.

<sup>2</sup>*Sinar Harapan*, 4 Agustus 1981. Lihat juga Hardjowirogo, "Doktrin Reagan dan Doktrin Monroe," *Sinar Harapan*, 7 September 1981.

<sup>3</sup>*Suara Karya*, 13 Juli 1981.

Pemerintah Reagan menawarkan paket bantuan militer dan ekonomi sebesar US\$ 3,2 milyar untuk jangka waktu lima tahun kepada Pakistan, di samping sejumlah pesawat mutakhir F-16 yang akan dibayar kontan dengan bantuan Arab Saudi. Tawaran paket bantuan itu diberitahukan pertama kali oleh Menteri Luar Negeri Alexander Haig kepada Menteri Luar Negeri Agha Shahi pada bulan April 1981 dan secara resmi disampaikan oleh pembantu Menteri Luar Negeri James Buckley ketika berkunjung ke Pakistan pada tanggal 15 Juni 1981. Jumlah bantuan itu sangat kontras dibandingkan dengan bantuan berjangka dua tahun sebesar US\$ 400 juta yang pernah ditawarkan sebelumnya oleh Presiden Jimmy Carter yang dianggap oleh Presiden Zia ul-Haq sebagai kacang (peanuts) karena jumlahnya tidak memadai sehingga ditolak mentah-mentah oleh pemerintahnya.<sup>1</sup>

Paket bantuan Pemerintah Reagan itu jelas mencerminkan suatu perubahan drastis politik luar negeri Amerika Serikat di Asia Selatan, khususnya terhadap Pakistan. Dengan perkataan lain bantuan itu mengandung suatu orientasi baru politik luar negeri Amerika Serikat di kawasan Asia Selatan setelah perhatian Amerika Serikat di kawasan itu merosot selama masa Pemerintahan Jimmy Carter. Dengan demikian paket bantuan itu merupakan langkah untuk menata kembali (renewal) hubungan Amerika Serikat dengan Pemerintah Jenderal Zia ul-Haq yang diharapkan oleh Pemerintah Reagan akan memainkan peranan penting dalam usahanya membendung ambisi Uni Soviet untuk menguasai Teluk Parsi. Suplai senjata itu diharapkan dapat mengimbangi tentara Uni Soviet yang menduduki Afghanistan dan menguatkan tumpuan yang pro Barat di kawasan yang strategis itu.

Untuk melaksanakan paket bantuan itu, maka diadakan suatu perundingan yang intensif antara kedua negara. Pada bulan Juli 1981, Pakistan mengutus sebuah delegasi yang dipimpin oleh pejabat-pejabat militer utama untuk membahas perincian tawaran bantuan militer itu, yang disusul kemudian oleh kunjungan Menteri Luar negeri Agha Shahi ke Amerika Serikat pada bulan Agustus 1981. Agha Shahi mengatakan bahwa kunjungannya itu adalah untuk "meningkatkan dialog" sehubungan dengan pengertian yang telah dicapai sebelumnya dengan Pembantu Menteri Luar Negeri James Buckley. Namun yang dimaksudkan oleh Agha Shahi tentu saja ialah realisasi paket bantuan Amerika Serikat kepada Pakistan itu.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Dr. H. Kissinger juga berpendapat bahwa dengan jumlah sebesar itu Pakistan tidak akan sanggup menahan serangan dari kedua negara tetangganya yang kuat yaitu Afghanistan/Uni Soviet di Barat dan India di Timur. *Kompas*, 16 Januari 1980.

<sup>2</sup>Dalam rangka memantapkan realisasi paket bantuan itu suatu seminar mengenai masalah itu telah berlangsung di Lahore tanggal 30 Juni 1981. Lihat "Debate on Renewal Pakistan's American Connection," *Strategic Digest*, Vol. XI, No. 8, Agustus 1981.

Kunjungan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Jean J. Kirkpatrick ke Pakistan pada awal September 1981 semakin mengkonkritkan rencana itu sambil memberikan jaminan kepada Pakistan bahwa Pemerintah Reagan sedang mendesak Kongres agar menyetujui paket bantuan itu. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Amerika Serikat telah mempercepat pembuatan pesawat F-16 yang sangat diperlukan oleh Pakistan.

Namun karena belum diberikan jaminan yang pasti kepada Pakistan mengenai jadwal realisasi paket bantuan itu, timbul sedikit ketegangan antara Amerika Serikat dan Pakistan. Terlebih-lebih ketika tersiar kabar bahwa Pakistan harus menunggu selama 24 bulan lagi untuk mendapatkan kiriman pesawat-pesawat F-16, padahal Pakistan mendesak Amerika Serikat agar segera melaksanakan penyerahan pesawat-pesawat itu. Bagi Pakistan, pesawat F-16 digolongkan sebagai "pembelian mendesak" yang akan dibayar kontan. Presiden Zia ul-Haq mengatakan bahwa, bila Amerika Serikat menunda pengiriman pesawat-pesawat itu, kredibilitas Amerika Serikat akan ternoda di mata Pakistan.<sup>1</sup> Penyerahan secepatnya pesawat-pesawat itu, kata Zia ul-Haq, merupakan "batu ujian" bagi persahabatan Amerika Serikat-Pakistan.<sup>2</sup>

Dengan demikian dalam masalah ini terdapat perbedaan pandangan antara kedua negara itu mengenai jadwal pengiriman pesawat-pesawat tersebut. Perbedaan ini baru dapat diselesaikan setelah pembantu Menteri Luar Negeri James Buckley berkunjung kembali ke Pakistan pada bulan September 1981 untuk menjernihkan permasalahannya. Namun diduga bahwa ada faktor utama lain yang mendesak Amerika Serikat untuk segera menyerahkan sebagian dari pesawat-pesawat tersebut, yaitu semakin meningkatnya frekuensi insiden di perbatasan Pakistan-Afghanistan. Meskipun dalam skala yang terbatas, tentara Afghanistan melakukan penyerbuan-penyerbuan ke dalam wilayah Pakistan.<sup>3</sup>

Hanya sehari sebelum kunjungan Pembantu Menteri Luar Negeri James Buckley ke Pakistan itu, tentara Afghanistan menyerbu desa Shahbaz Killi, sekitar 10 km sebelah barat laut Quetta, ibukota propinsi Baluchistan. Sumber militer Pakistan mengatakan bahwa serbuan-serbuan itu dimaksudkan sebagai tantangan Afghanistan terhadap rencana pengiriman persenjataan Amerika Serikat kepada Pakistan.

---

<sup>1</sup>*Suara Karya*, 9 September 1981.

<sup>2</sup>*Antara*, 10 September 1981.

<sup>3</sup>Sebagai ukuran dapat disebutkan pengaduan Pakistan kepada Sekretaris Jenderal PBB mengenai pelanggaran terhadap wilayah udaranya sebanyak 23 kali oleh Afghanistan. *Antara*, 28 Nopember 1981.

Tanggal 15 September 1981, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat akhirnya mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan mempercepat penyerahan sekitar 40 pesawat F-16 (rombongan pertama) kepada Pakistan. Amerika Serikat kemudian mengirimkan sekitar enam buah pesawat F-16 ke Pakistan, yang menurut rencana semula akan diberikan kepada beberapa negara Eropa Barat untuk menunjang NATO. Dengan demikian realisasi bantuan militer Amerika Serikat ke Pakistan itu telah dimulai.

## REAKSI INDIA DAN PENGARUHNYA

Rencana modernisasi atau peningkatan bobot militer Pakistan itu telah menimbulkan kecurigaan dan kerisauan pada India. Karenanya timbul ketegangan antara mereka, yang akhir-akhir ini semakin meningkat seperti tercermin dari reaksi-reaksi dan tanggapan-tanggapan yang dikeluarkan oleh India dan Pakistan.

Ketegangan hubungan mereka itu semakin jelas terlihat terutama dari tindak lanjut yang diambil oleh India untuk meningkatkan pula kemampuan militernya dengan jalan membeli perlengkapan-perengkapan militer baru yang mutakhir dari Uni Soviet dan Perancis.

Meningkatnya ketegangan hubungan mereka itu dapat pula dilihat dari frekuensi insiden perbatasan yang meningkat antara pasukan-pasukan mereka. Suatu kesalahan fahaman yang dapat mengobarkan insiden besar-besaran antara mereka hampir saja terjadi ketika sumber pertahanan India mengungkapkan pada bulan Juli 1981 bahwa Pakistan memusatkan 350.000 orang pasukan di daerah perbatasannya dengan India. Tetapi Pemerintah Pakistan dengan cepat membantah kebenaran berita itu dan menganggapnya tendensius dan menegaskan keinginan Pakistan untuk menjalin hubungan yang baik dengan India.

Pengamat-pengamat politik mengatakan bahwa berita itu ditiupkan India sebagai usaha untuk mengobarkan oposisi di Amerika Serikat terhadap rencana paket bantuan kepada Pakistan tersebut. Dengan cara itu, India rupanya ingin menimbulkan kesan terutama di kalangan anggota Kongres bahwa paket bantuan itu dapat mendorong terjadinya suatu eskalasi militer antara Pakistan dan India, agar Kongres menentang dan mementahkan rencana paket bantuan itu.

Dalam berbagai tanggapannya, Perdana Menteri India Ny. Indira Gandhi antara lain mengatakan bahwa peningkatan bobot persenjataan (modernisasi) Pakistan merupakan ancaman terhadap keamanan India dan dapat menggon-

cangkan keseimbangan keamanan di kawasan Asia Selatan serta akan mengakibatkan perlombaan senjata antara Pakistan dan India.<sup>1</sup>

Dari reaksi-reaksi yang dikeluarkan itu adalah jelas bahwa kekuatiran India terutama bersumber pada suplai pesawat F-16 kepada Pakistan mengingat kemampuan pesawat itu. Pesawat F-16 merupakan pesawat ofensif model NATO yang mutakhir dan pernah digunakan Israel untuk menghancurkan reaktor nuklir Irak pada tanggal 7 Juni 1981. Dibandingkan dengan jenis-jenis pesawat pembom tempur yang dimiliki India seperti Mig-23 buatan Uni Soviet dan Jaguar buatan Inggris-Perancis, kemampuan pesawat F-16 jauh lebih besar. Pesawat F-16 dapat digunakan untuk menyerbu secara lebih sempurna dengan daya jangkau yang lebih jauh. Dengan pesawat itu, Pakistan secara mudah dapat menyerbu New Delhi dan kota-kota penting lainnya yang letaknya jauh di pedalaman India. Agaknya India juga merasa sangat khawatir bahwa Pakistan akan menggunakan pesawat-pesawat tersebut untuk membom reaktor nuklirnya.<sup>2</sup>

Dewasa ini kekuatan militer Pakistan jauh ketinggalan dibandingkan dengan kekuatan militer India, baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Namun ada anggapan bahwa setelah Pakistan memperoleh pesawat F-16 dari Amerika Serikat beserta senjata-senjata lainnya, keunggulan itu berkurang. Oleh karena itu dapat difahami mengapa India cemas dengan keputusan Amerika Serikat untuk mensuplai pesawat-pesawat F-16 kepada Pakistan. Akan tetapi kekuatiran itu sebenarnya terlalu dibesar-besarkan. Suatu perang tidak dapat dimenangkan semata-mata karena keunggulan persenjataan melainkan juga dengan dukungan faktor-faktor lainnya. Di samping itu suplai persenjataan Amerika Serikat belum sepenuhnya diterima oleh Pakistan dan "kekuatan nasional" India<sup>3</sup> berada jauh di atas Pakistan (sebagai perbandingan lihat Lampiran).

Itulah beberapa alasan yang mendorong India untuk mengecam Pakistan dan Amerika Serikat. Sehubungan dengan itu pula Menteri Luar Negeri India berkunjung ke Pakistan pada bulan Juni 1981 yang lalu untuk mencari kejelasan sekaligus menjelaskan sikap India secara langsung kepada Pemerintah Pakistan mengenai paket bantuan itu.

<sup>1</sup>Lihat Jonathan Power, "An Interview with Mrs. Gandhi," *Strategic Digest*, Januari 1982, halaman 35.

<sup>2</sup>Kekuatiran itu telah diungkapkan oleh Menteri Negara Urusan Pertahanan India Shivraj Patil kepada Majelis Tinggi (Raya Sabha) bahwa pabrik-pabrik nuklir dan ladang-ladang minyak India berada dalam jangkauan pesawat-pesawat F-16. Lihat *Antara*, 20 Agustus 1981.

<sup>3</sup>Yang dimaksudkan penulis dalam hal ini ialah kekuatan yang mencakup jumlah penduduk, perekonomian, teknologi, kekuatan militer dan faktor-faktor lainnya yang dapat dianggap sebagai elemen penting yang menunjang pertahanan secara global.

Baik melalui Menteri Luar Negeri Agha Shahi maupun Presiden Zia ul-Haq, Pakistan menangkis tuduhan-tuduhan India itu dengan mengatakan bahwa kekuatiran India itu tidak beralasan, karena usahanya untuk memperkuat pertahanannya dilatar belakangi oleh situasi politik di Afghanistan akibat intervensi militer Uni Soviet di negara itu.<sup>1</sup>

Kepada Menteri Luar Negeri India Narasimha Rao, Presiden Zia ul-Haq mengatakan bahwa Pakistan menghendaki suatu "hubungan bebas tegang" dengan India dan tidak bermaksud menyaingi India di bidang militer. Menteri Luar Negeri Pakistan Agha Shahi lebih lanjut menandakan bahwa Pakistan tidak melakukan perlombaan senjata atau menginginkan suatu perimbangan militer dengan India. Ia sangat menyesalkan sikap India yang justru dianggapnya akan menimbulkan "ketegangan." Dalam melakukan pembelaannya ia menunjuk pada bantuan-bantuan senjata modern yang diperoleh India dari Uni Soviet dan Eropa Barat yang diperkirakan bernilai US\$ 10 milyar. Bantuan-bantuan militer itu dinilai telah melampaui kebutuhan pertahanan India, tetapi tidak pernah dipersoalkan oleh Pakistan.

Untuk menghilangkan kecurigaan India terhadap maksud dan tujuan bantuan persenjataan Amerika Serikat kepada Pakistan itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Jean J. Kirkpatrick pada bulan Agustus 1981 mengadakan serangkaian kunjungan ke beberapa negara Asia Selatan yang meliputi India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka dan Pakistan (juga Muangthai). Agaknya Amerika Serikat juga menyadari implikasi paket bantuan ini untuk situasi politik di Asia Selatan secara keseluruhan. Oleh karena itu Amerika Serikat merasa perlu memberikan penjelasan-penjelasan kepada mereka untuk menghindari salah-pengertian, terutama antara India dan Pakistan.

Di New Delhi, Jean J. Kirkpatrick menjelaskan kepada Ny. Indira Gandhi bahwa bantuan itu hanya dimaksudkan untuk menangkis upaya hegemoni Uni Soviet di Asia Selatan dan tidak untuk mengancam India.<sup>2</sup> Namun penjelasan ini tidak dapat meyakinkan Perdana Menteri India Ny. Indira Gandhi dan India mempertahankan sikapnya.

Dengan demikian masalah ini menemui jalan buntu. Suatu perlombaan senjata antara Pakistan dan India karenanya tidak dapat dihindarkan lagi. Apa yang dikuatirkan India justru menjadi kenyataan karena ia memutuskan pula untuk membeli persenjataan-persenjataan baru yang mutakhir guna mengimbangi Pakistan. India segera berpaling kepada Uni Soviet dan

---

<sup>1</sup>Kecuali mengkuatirkan ancaman serbuan terhadap wilayahnya, sekitar dua juta pengungsi Afghanistan telah mengalir ke Pakistan. Hal ini telah menimbulkan beban-beban tambahan terhadap negaranya baik dari sudut material maupun keamanan.

<sup>2</sup>*Kompas*, 26 Agustus 1981.

membeli satu skuadron pesawat Mig-25 (Foxbat).<sup>1</sup> Pada bulan Desember 1981 India juga merundingkan pembelian kapal selam dengan Uni Soviet untuk memperkuat Angkatan Lautnya serta merencanakan untuk membeli kapal induk kedua (di samping kapal induk Vikrant).

Kecuali dari Uni Soviet, India juga mengusahakan pembelian 150 buah pesawat tempur jet mutakhir Mirage-2000 dari Perancis.<sup>2</sup> Suatu misi militer India berkunjung ke Perancis pada bulan Desember 1980 untuk menilai kemampuan pesawat itu, dan pembelinya dibicarakan dengan Menteri Luar Negeri Perancis Claude Cheysson ketika ia berkunjung ke India pada bulan Agustus 1981.<sup>3</sup>

Press Trust of India (PTI) memberitakan bahwa harga seluruh pesawat itu beserta persenjataan lainnya mencapai sekitar US\$ 3,3 milyar. Dan Perdana Menteri Ny. Indira Gandhi akan menandatangani kontrak pembelian senjata itu dalam kunjungannya ke Perancis tanggal 12-14 Nopember 1981. Hal ini diungkapkan oleh seorang pejabat India setelah sebuah delegasi pejabat tinggi militer India yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan India P.I. Kaul berkunjung ke Perancis untuk membicarakan masalah pembelian pesawat itu.

Dalam kunjungan Perdana Menteri Ny. Indira Gandhi ke Perancis ini, kedua negara mengeluarkan komunike bersama yang berbunyi bahwa mereka antara lain: (1) menyetujui untuk memperkuat kerja sama mereka guna membantu terwujudnya suatu tata dunia baru; (2) menyetujui untuk membentuk suatu kelompok konsultasi regular antara kedua negara di bidang energi; (3) mencela setiap campur tangan asing terhadap negara lain; (4) menentang perluasan konfrontasi blok serta peningkatan perlombaan senjata.<sup>4</sup> Tetapi masalah pembelian 150 buah pesawat Mirage-2000 tidak disebutkan dalam komunike bersama itu. Namun dari keterangan Ny. Indira Gandhi dapat disimpulkan bahwa masalah ini akan dibicarakan. Ia mengatakan bahwa perundingan bagi pembelian pesawat-pesawat itu akan diselesaikan oleh pejabat-pejabat tinggi India di hari-hari mendatang. Akhir bulan Nopember

---

<sup>1</sup>Sumber pertahanan India menyatakan bahwa India telah memperoleh beberapa pesawat pengintai terbang tinggi Mig-25 dan pesawat pemburu di segala cuaca RS dari Uni Soviet.

<sup>2</sup>Pesawat tempur Mirage-2000 dilengkapi dengan peluru kendali dari udara ke udara dan udara ke darat. Kecepatannya 2,2 mach atau lebih dua kali kecepatan suara. India hanya membeli 15 buah, dan sisanya akan dibuat serta dirakit di pabrik senjata Bangalore. Hal ini akan menjadikan India mencapai suatu tingkat teknologi yang tidak dimiliki negara berkembang lain. Lihat *Jurnal Ekuin*, 12 Nopember 1981.

<sup>3</sup>Di bawah Presiden F. Mitterand, Menteri Luar Negeri Cheysson sedang melancarkan usaha-usaha baru guna memperkokoh hubungan Perancis dengan negara-negara Dunia Ketiga, sebagai salah satu usaha mengubah situasi politik dan ekonomi dunia secara kuantitatif.

<sup>4</sup>*Kompas*, 16 Nopember 1981.

1981, Menteri Pertahanan India akhirnya memastikan pembelian pesawat Mirage-2000 itu.<sup>1</sup>

## PENUTUP

Pakistan dan India berhasrat untuk memperbaiki hubungan mereka. Namun sikap mereka tidak konsisten karena mereka saling mencurigai. Sikap saling mencurigai itu merupakan faktor dominan yang menghambat usaha-usaha mereka untuk menjalin hubungan yang lebih erat dan bersahabat. Di samping itu trauma historis kedua bangsa ini tetap merupakan faktor laten yang segera menguakkan luka-luka lama bilamana timbul suatu persoalan baru di antara mereka. Persoalan baru semacam itu ialah rencana Pakistan untuk memodernisasi persenjataannya dengan senjata-senjata mutakhir berdasarkan paket bantuan militer dan ekonomi Amerika Serikat sebesar US\$ 3,20 milyar beserta suplai pesawat F-16 model NATO.

Rencana Pakistan itu telah menjadi sumber ketegangan India-Pakistan. Oleh India, paket bantuan itu dianggap melampaui kebutuhan maksimum pertahanan Pakistan, terlebih-lebih karena Pakistan juga mempersenjatai dirinya dengan pesawat mutakhir F-16. Hal itu dianggap akan menggoncangkan perimbangan militer antara mereka pada khususnya dan di Asia Selatan pada umumnya. Lebih lanjut India menganggap paket bantuan itu sebagai ancaman terhadap dirinya. Meskipun Pakistan telah mengemukakan alasan-alasan rencana modernisasi persenjataannya, yang dilengkapi kemudian oleh penjelasan-penjelasan Amerika Serikat kepada India, kecemasan India tidak mereda.

India bahkan melakukan tindakan yang sama dengan membeli perlengkapan-perengkapan militer yang mutakhir dari Uni Soviet dan Perancis dalam jumlah yang seimbang. Dengan tindakan India itu, terjadi perlombaan senjata di Asia Selatan yang meningkatkan suhu politik di Asia Selatan. Dapat dikatakan bahwa perlombaan senjata itu akhir-akhir ini telah menimbulkan iklim "perang dingin" antara India dan Pakistan.<sup>2</sup>

Kekuatiran India bahwa modernisasi persenjataan Pakistan merupakan ancaman terhadap dirinya sebenarnya kurang beralasan, sebab invasi Uni Soviet ke Afghanistan jelas merupakan ancaman serius terhadap Pakistan,

<sup>1</sup>*Antara*, 29 Nopember 1981.

<sup>2</sup>Hal ini semakin jelas tampak dari tindakan yang diambil India dan Pakistan untuk mengusir diplomat-diplomat mereka secara timbal balik dengan tuduhan melakukan kegiatan mata-mata. Diduga, kejadian itu merupakan perluasan (ekstensi) dari ketegangan hubungan mereka selama beberapa waktu ini. *Suara Karya*, 26 Nopember 1981.

baik karena Uni Soviet berambisi untuk menguasai dunia, maupun karena hubungan Pakistan dengan Afghanistan tidak pernah harmonis. Maka usaha-usaha Pakistan untuk meningkatkan kemampuannya untuk menangkis ancaman-ancaman terhadap dirinya merupakan konsekuensi logis dari situasi regional yang dihadapinya.

Perkiraan bahwa Pakistan akan menyerang India agak terlalu dibesar-besarkan, sebab bantuan tersebut dimaksudkan sebagai alat untuk "menangkal" ancaman yang tertuju pada dirinya dan tidak untuk maksud-maksud agresif.

Pakistan kiranya tidak akan gegabah untuk menyerang India. Kekalahan perang sebanyak tiga kali dengan India memaksa Pakistan untuk berfikir jauh ke depan sebelum meriskir suatu peperangan dengan India, terlebih-lebih karena menyadari bahwa "kekuatan nasionalnya" jauh di bawah kekuatan India.

Kecuali itu, Amerika Serikat sebagai negara pensuplai senjata kepada Pakistan telah memberikan jaminan-jaminan kepada India bahwa senjata-senjata itu tidak dimaksudkan untuk mengancam India. Lebih lanjut Amerika Serikat mengenakan semacam kontrol pada Pakistan agar tidak menyalahgunakan bantuan tersebut. Dalam keterangannya kepada Komisi Senat Urusan Luar Negeri, Pembantu Menteri Luar Negeri James Buckley, mengatakan bahwa penjualan senjata Amerika Serikat kepada Pakistan dapat dihentikan jika Pakistan meledakkan sebuah bom nuklir. Kecuali itu Amerika Serikat juga dapat mengenakan embargo kepada Pakistan.<sup>1</sup>

Keberatan India terhadap paket bantuan itu juga bersifat sepihak sebab India sendiri sudah lama melaksanakan program pengembangan militer besar-besaran. India bahkan telah meledakkan bom nuklir pertamanya pada tahun 1974.

Ketegangan hubungan dan perlombaan senjata antara mereka jelas merupakan suatu ancaman yang serius terhadap kestabilan politik dan perdamaian di Asia Selatan dan tidak mustahil akan meledak menjadi suatu konflik militer yang mudah melibatkan negara-negara super power. Hal ini dapat disimpulkan dari maksud dan tujuan pemberian bantuan Amerika Serikat kepada Pakistan itu dan reaksi-reaksi Uni Soviet.

Suplai senjata itu diharapkan dapat mengimbangi pendudukan tentara Uni Soviet atas Afghanistan dan menguatkan tumpuan yang pro Barat di kawasan yang strategis itu serta membendung ambisi Uni Soviet untuk menguasai Teluk Parsi.

---

<sup>1</sup>*Antara*, 13 Nopember 1981. Namun tidak dijelaskan bentuk-bentuk embargo yang akan dikenakan kepada Pakistan.

Sebagai tanggapan, Menteri Luar Negeri Uni Soviet Andrei Gromyko menandakan bahwa Amerika Serikat mengganggu Asia dengan menjual senjata kepada Pakistan. Uni Soviet, katanya, akan mengambil segala tindakan yang perlu untuk melindungi diri, sekutu dan sahabat-sahabatnya.<sup>1</sup> Kecuali itu tidak mustahil bahwa RRC akan melibatkan diri dalam kemelut itu karena Asia Selatan khususnya Pakistan juga merupakan medan strategis bagi kepentingan politiknya.<sup>2</sup>

Untuk menghindarkan meletusnya suatu konflik bersenjata antara mereka, India dan Pakistan harus menahan diri dan tidak mengambil tindakan-tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan dan perlombaan senjata. Masing-masing pihak hendaknya menyadari bahwa suatu perang akan merupakan bencana bagi mereka dan mempunyai implikasi politik dan militer yang luas di Asia Selatan pada khususnya dan di dunia pada umumnya.

Lebih penting lagi, kedua negara hendaknya melanjutkan usaha-usaha mereka untuk menjalin hubungan yang lebih erat. Dengan demikian dapat dihindarkan bencana peperangan antara mereka.

Agaknya sudah tiba saatnya bagi kedua negara itu untuk melaksanakan Perjanjian Simla tahun 1972 dan lebih dari itu memikirkan secara sungguh-sungguh suatu pakta non-agresi antara mereka seperti diusulkan Pakistan baru-baru ini,<sup>3</sup> terlebih-lebih karena Perdana Menteri Indira Gandhi telah menyatakan kesediaannya untuk merundingkan hal itu dengan Pakistan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>*Kompas*, 10 Agustus 1981.

<sup>2</sup>Lihat Wiratmo Soekito, "Ofensif Diplomatik Cina di Asia Selatan." *Pelita*, 8 Juni 1981. Kaitkan pula hal ini dengan persaingan Uni Soviet dan RRC untuk menjadi pemimpin komunis dunia.

<sup>3</sup>*Antara*, 12 Nopember 1981.

<sup>4</sup>*Antara*, 25 Nopember 1981.

## LAMPIRAN

## PERBANDINGAN KEKUATAN NASIONAL INDIA-PAKISTAN

INDIA	PAKISTAN
<i>Global</i>	<i>Global</i>
<p>Population: 683,900,000.  Military service: voluntary.  Total armed forces: 1,104,000.  Estimated GNP 1980: \$ 116 bn.  Defence expenditure 1981-2: 42 bn rupees (\$ 5.12 bn).  \$1 = 8.21 rupees (1981), 8.17 rupees (1980)</p>	<p>Population: 88,950,000.  Military service: voluntary.  Total armed forces: 450,600.  Estimated GNP 1980: \$ 30 bn.  Defence expenditure 1980: 15.29 bn rupees (\$ 1.54 bn).  \$ 1 = 9.91 rupees (1980).</p>
<i>Army</i>	<i>Army</i>
<p>Army: 944,000.  2 armd divs.  18 inf divs.  10 mountain divs.  6 indep armd bdes.</p> <p>1 indep inf bde.  2 para bdes.  1 cdo bde.  17 indep arty bdes, incl about 20 AA regts.  950 T-54/-55, 170 T-72, 1,000 <i>Vijayanta</i> med, AMX-13 lt tks; 700 BTR-50/-60/-152, OT-62A/-64A APC; 76mm, 25-pdr, 300 100mm, 550 130mm, 5.5-in, S-23 180mm guns; 75mm pack, 75/24 mountain, 105 mm (incl pack, <i>Abbot</i> SP), M-115 203mm how; 500 120mm, 160mm mor; M-18 57 mm, <i>Carl Gustav</i> 84mm, 106mm RCL; SS-11, <i>Harpon</i>, <i>ENTAC</i> ATGW; 57mm ATK guns; 40mm, 3.7-in towed, ZSU-23-4 SP AA guns; SA-6, 40 <i>Tigercat</i> SAM.  (On order: 600 T-72 med tks, 230 M-198 155 mm how, 60 <i>TOW</i> ATGW launchers, 3,700 msls.)</p> <p>RESERVES: 200,000. Territorial Army 40,000.</p>	<p>Army: 420,000 (incl 29,000 <i>Azad Kashmir</i> tps).  7 corps HQ.  2 armd divs.  16 inf divs.  4 indep armd bdes.  4 indep inf bdes.  6 arty bdes.  2 AA arty bdes.  6 armd recce regts.  12 SAM btys with 24 <i>Crotale</i>.  1 Special Services Group.  M-4, 250 M-47/-48, 35 T-54/-55, 1,000 Type-59 med, 15 PT-76, Type-60/-63, 50 M-24 lt tks; 550 M-113, K-63 APC: some 1,000 25-pdr, 100mm, 130mm, 5.5-in, 155mm guns; 75mm pack, 105mm incl pack and 12 M-7 SP, 155mm towed and M-109 SP how; 270 107mm, 120mm mor; 57mm, 100mm towed, 8 M-36 90mm SP ATK guns; 75mm, 83mm, 3.5-in RL; 106mm RCL; <i>Cobra</i> ATGW; ZU-23 23mm, 37mm, 60 40mm, 57mm, 15 90mm, 3.7-in AA guns; 24 <i>Crotale</i> SAM.  5 army aviation sqns: 1 liaison sqn with 30 Saab <i>Supporter</i> lt ac; 4 hel sqns.  Indep army observation flts with 40 O-1E ac, 12 Mi-8, 35 <i>Puma</i>, 20 <i>Alouette</i> III, 15 Bell 47G hel.  (On order: <i>TAM</i> med tks; M-113 APC; 24 <i>TOW</i> ATGW launchers.)</p> <p>RESERVES: 500,000.</p>

Navy	Navy
<p>Navy: 47,000, incl naval air force.  8 ex-Sov F-class submarines.  1 ex-Br <i>Majestic</i>-class aircraft carrier (capacity 18 <i>Sea Hawk</i>, 4 <i>Alize</i>; converting to <i>Sea Harrier</i>).  1 ex-Br <i>Fiji</i>-class cruiser (trg).  2 ex-Sov <i>Kashin</i>-class destroyers with 4 <i>Styx</i> SSM; SA-N-1 SAM, 1 hel.  24 frigates; 6 <i>Leander</i> with <i>Seacat</i> SAM, 1 hel 2 ex-Br <i>Whitby</i> with <i>Styx</i> SSM; 12 ex-Sov <i>Petya</i> II; 4 trg (3 ex-Br <i>Leopard</i>, 1 <i>Black Swan</i>).</p> <p>3 ex-Sov <i>Nanuchka</i> corvettes with <i>Styx</i> SSM SA-N-4 SAM.  16 ex-Sov <i>Osa</i>-1/II FAC(M) with <i>Styx</i> SSM.  1 <i>Abhay</i>, 3 SDB-2 large patrol craft.  6 ex-Sov <i>Naty</i> ocean, 4 ex-Br <i>Ton</i> coastal, 4 ex-Br <i>Ham</i> inshore minesweepers.  1 ex-Br, 6 ex-Sov <i>Polnocny</i> LCT, 6 LCU.  (On order: 4 SSK-1500 submarines, 2 <i>Kashin</i>-type destroyers, 5 <i>Godevari</i> (modified <i>Leander</i>) frigates, 4 <i>Nanuchka</i> corvettes, 6 <i>Polnocny</i> LCT.)</p> <p>NAVAL AIR FORCE: (2,000); 33 combat aircraft, 27 armed hel.  2 attack sqns with 20 <i>Sea Hawk</i> (10 in carrier)  1 ASW sqn with 5 <i>Alize</i> 1050 (4 in carrier).  2 MR sqns with 5 <i>Super Constellation</i>, 3 Il-38 <i>May</i>.  5 ASW hel sqns with 11 <i>Sea King</i>, 5 Ka-25, 11 <i>Alouette</i> III.  1 SAR/liason hel sqn with 10 <i>Alouette</i> III.  3 trg/comms sqns with 7 HJT-16 <i>Kiran</i>, 4 <i>Vampire</i> T-55, 10 <i>Islander</i>, 1 <i>Devon</i>, 2 <i>Sea-hawk</i> ac; 4 Hughes 300 hel.  (On order: 8 <i>Sea Harrier</i> EGA, 3 Il-38 MR, 6 <i>Islander</i> trg ac.)  <b>Bases:</b> Western Fleet: Bombay, Goa, Cochin.  Eastern Fleet: Vishakapatnam, Calcutta, Port Blair.</p>	<p>Navy: 13,000; 5 combat ac, 6 armed hel.  6 submarines: 2 <i>Agosta</i>, 4 <i>Daphne</i>.  5 SX-404 midget submarines.  1 ex-Br <i>Dido</i> cruiser (cadet trg ship).  8 destroyers: 4 ex-US <i>Gearing</i> with <i>ASROC</i> ASW; 4 ex-Br (1 <i>Battle</i>, 1 CH, 2 CR).  6 large patrol craft: 1 <i>Town</i>, 5 ex-Ch <i>Hainan</i>.  12 ex-Ch <i>Shanghai</i>-II FAC (G).  4 ex-Ch <i>Huchwan</i> hydrofoil FAC (T) &lt;.  19 coastal patrol craft: 1 <i>Spear</i>, 18 M-55 Type  6 ex-US <i>Adjutant</i> and 268-class coastal MCM.  1 ex-US <i>Mission</i> underway replenishment tanker.</p> <p>NAVAL AIR:  2 ASW/MR sqns with 3 <i>Atlantic</i>, 2 HU-16B with AM-39 ASM.  2 ASW/SAR hel sqns with 6 <i>Sea King</i> ASW with AM-39, 4 <i>Alouette</i> III.  ASM: AM-39 <i>Exocet</i>.</p> <p><b>Base:</b> Karachi.</p> <p>RESERVES: 5,000.</p>
<i>Air Force</i>	<i>Air Force</i>
<p><b>Air Force:</b> 113,000; some 614 combat aircraft  4 lt bbr sqns with 50 <i>Canberra</i> B(1)58, B(1)12  10 FGA sqns: 3 with 50 Su-7BM/KU; 3 with 48 <i>Hunter</i> F-56/-56A; 1 with 16 <i>Jaguar</i></p>	<p><b>Air Force:</b> 17,600; 220 combat aircraft.  1 lt bbr sqn with 11 B-57B (<i>Canberra</i>).  3 FGA sqns: 1 with 17 <i>Mirage</i> IIIED; 2 with 38 <i>Mirage</i> 5PA/DP.</p>

<p>GR-1, 2 T-2; 2 with 50 HF-24 <i>Marut</i>; 1 with 10 MiG-23BM (<i>Flogger F</i>) and MiG-23UM (<i>Flogger C</i>) forming, 2nd to form early 1982.</p> <p>15 AD/FGA sqns with 300 MiG-21/FL/PFMA/MF/bis/U.</p> <p>4 interceptor sqns with 80 <i>Ajeet</i> (<i>Gnat Mk II</i>). 1 recce sqn with 8 <i>Canberra</i> PR-57 (to be replaced by MiG-25).</p> <p>4 hel sqns with some 100 <i>Cheetah</i> (<i>Lama</i>) (replacing 20 <i>Krishak</i> and 10 <i>Auster</i> ac).</p> <p>3 trg and conversion sqns with <i>Canberra</i> T-4/T-13/T-67, <i>Hunter</i> F-56/T-66, MiG-21U.</p> <p>10 tpt sqns: 2 with 31 C-119G, An-32; 2 with 30, An-12; 2 with 24 DHC-3, 3 with 36 C-47, An-32; 1 with 20 DHC-4.</p> <p>1 comms sqn with 2 Tu-124, 16 HS-748 M.</p> <p>2 liaison flts with 16 HS-748, 4 C-47.</p> <p>9 tpt hel sqns: 5 with 60 Mi-4, 4 with 52 Mi-8.</p> <p>3 liaison hel sqns with 60 <i>Chetak</i> (<i>Alouette III</i>).</p> <p>Trainers incl 65 HT-2, 170 <i>Kiran</i> 1/1A, 15 <i>Marut</i> Mk 1T, 10 HPT-3 (replacing HT-2) 45 TS-4 <i>Iskra</i>, 27 HS-748 ac, <i>Chetak</i> hel.</p> <p>AAM: AA-2 <i>Atoll</i>.</p> <p>ASM: AS-30.</p> <p>20 SAM sqns with 120 SA-2/-3.</p> <p>(On order: 85 <i>Jaguar</i> (45 to be locally built*), 62 MiG-23BM, 13 MiG-23UM, MiG-21bis, 80 <i>Ajeet</i> (<i>Gnat Mk 2</i>) fighters; 8 MiG-25 recce; 40 An-32, 10 HS-748 tpts; 40 <i>Iskra</i>, 90 <i>Kiran</i> Mk 2 trg ac; Mi-8, 45 <i>Chetak</i> hel.)</p> <p><i>Para-Military Forces</i>: About 200,000 Border Security Force, 100,000 in other organizations. Coastguard: 2 ex-BR Type 14 frigates, 2 FAC (P), 5 <i>Poluchat</i> FAC (P), 4 <i>Alouette III</i> hel. (On order: 3 coastal patrol vessels.)</p>	<p>8 interceptor/FGA sqns with 144 MiG-19/F-6.</p> <p>1 recce sqn with 10 <i>Mirage</i> IIRP.</p> <p>2 tpt sqns: 1 with 14 C-130B/E, 1 L-100; 1 with 1 <i>Falcon</i> 20, 1 F-27, 1 <i>Super King Air</i>, 1 <i>Bonanza</i>, 1 L-23 ac; 1 <i>Puma</i> hel.</p> <p>1 SAR hel sqn with 10 HH-34B, 14 <i>Alouette III</i>.</p> <p>1 utility hel sqn with 4 <i>Super Frelon</i>, 12 Bell 47G.</p> <p>1 trg sqn with 20 T-33A, 4 MiG-15UTI.</p> <p>Other trainers incl 3 <i>Mirage</i> IIIDP, 87 <i>Supporter</i>, 35 T-37C, 24 <i>Shenyang</i> FT-5 (MiG-17U).</p> <p>AAM: <i>Sidewinder</i>, R-530, R-550 <i>Magic</i>. (On Order: 15 F-16, 32 <i>Mirage</i> 5, 18 <i>Mirage III</i> FGA; 30 <i>Supporter</i>, Reims FTB-337 trg ac.)</p> <p>RESERVES: 8,000.</p> <p><i>Para-Military Forces</i>: 109,100: 22,000 National Guard, 65,000 Frontier Corps, 15,000 Pakistan Rangers, 2,000 Coastguard, 5,100 Frontier Constabulary.</p>
--	--